

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kegiatan ekonomi manusia memperoleh pendapatan dan dengan pendapatan itulah manusia dapat melangsungkan kehidupan. Mengamati perkembangan sistem ekonomi saat ini lebih banyak diwarnai oleh sistem kapitalis. Hal ini terlihat pada dikuasainya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh pribadi. Seperti fasilitas perbankan dan pembelanjaan. Dalam lalu lintas perdagangan hampir tidak dapat dipisahkan dari perbankan. Sedangkan sistem perbankan yang berkembang di masyarakat adalah sistem bunga atau riba.

Dominasi transaksi dengan sistem ini dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi dan marginalisasi kebenaran. Dalam

transaksi keuangan hal ini mungkin terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telah dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini menolong orang lain dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan kepada orang lain.

Produktivitas usaha adalah ketersediaan modal yang cukup. Tetapi bagi pengembangan sebuah usaha kecil, masalah modal merupakan kendala terbesar yang dihadapi. Usaha kecil biasanya berkaitan erat dengan adanya faktor kekurangan modal, sehingga hal tersebut membuat para pengusaha kecil mengambil jalan pragmatis, yakni mencari bantuan modal dari rentenir atau lebih dikenal dengan sebutan lintah darat. Pada kenyataannya, rentenir sangat merugikan, yaitu membebani para peminjam dengan sejumlah bunga yang begitu besar. Dengan demikian bukan keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha kecil, melainkan mereka harus membayar pokok pinjaman dengan ditambah bunga yang telah dibebankan kepada mereka. Dengan sistem rentenir ini, para pengusaha kecil merasa terbebani sehingga tidak mampu untuk meningkatkan produktivitas ataupun mengembangkan usaha perekonomian mereka.

Berdasarkan fenomena diatas perlu langkah-langkah antisipatif dalam menanggulangi dampak praktik sistem keuangan yang tidak mendukung pada pengusaha kecil. Menyadari peranan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan solusi yang terbaik karna sangat besar kontribusinya dalam perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari aspek-aspek seperti peningkatan kesempatan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor non migas. Jumlah Usaha Kecil di Indonesia cukup besar dan bergerak di berbagai sektor ekonomi serta terbesar di seluruh wilayah Indonesia.

Kelompok usaha ekonomi kecil ini merupakan salah satu pelaku usaha yang terbukti survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi dahsyat yang pernah melanda negeri ini. Dan survival ini disebabkan usaha kecil di Indonesia tidak terlalu terkait atau bermasalah dengan kredit perbankan, seperti halnya yang membelit kelompok usaha besar. Utang kelompok usaha kecil ini relative kecil. Kredit macet kelompok ini tidak lebih 0,5% sedangkan kredit macet pengusaha besar mencapai 70% dari total utangnya yang jumlahnya ratusan triliun. Ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, sekitar 64% usaha kecil termasuk

usaha menengah dari 200.000 lebih jenis usaha dapat bertahan bahkan hampir 1% lainnya mengalami pertumbuhan positif dengan 31% saja yang mengurangi kegiatan usahanya, dan hanya 4% yang terpaksa menghentikan sama sekali usahanya.<sup>1</sup>

Data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan pada tahun 2017 terdapat 62.928.077 juta total unit usaha di Indonesia, dimana 99,99% (62.922.617 juta unit usaha) adalah Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang demikian besar merayap tenaga kerja sebanyak 116.673.416 juta orang atau 97,2% dari total tenaga kerja Indonesia. Sementara jika dilihat secara sektoral, sebagian besar populasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2014 adalah sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48.85%), Perdagangan, Hotel dan Restoran (28.83), pengangkutan dan Komunikasi (6.88%), industri Pengolahan (6.41%), jasa-jasa (4.52%). Sedangkan populasi usaha berskala besar mayoritas bergerak di sektor industri Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2.37%), bangunan (1.57%), pertambangan dan Penggalian (0.53%), Listrik, Gas dan Air Bersih (0.03%).

---

<sup>1</sup>. Adi Sasono, Rakyat Bangkit Bangun Martabat, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), cet ke – 1 P. 90-91

Menurut BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM, suatu usaha digolongkan sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari 1 milyar pertahun. Sementara usaha menengah adalah usaha yang memiliki omset antara 1 sampai dengan 50 milyar pertahun, sedangkan usaha dengan omset di atas 50 miliar rupiah pertahun dikelompokkan ke dalam usaha besar.

Persoalan mendasar dan utama bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari aspek internal dan eksternal.<sup>2</sup>

Hambatan pada faktor eksternal yakni: *Pertama*, terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan usaha kecil. *Kedua*, kesulitan untuk mendapatkan data yang jelas dan pasti tentang jumlah dan penyebab usaha kecil yang menghambat upaya pembinaan dan pengembangannya. *Ketiga*, alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang, baik antar golongan, antar struktur, antar wilayah, dan antar desa-kota. *Keempat*, Sebagian besar produk industry kecil memiliki ciri karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan life time yang pendek. *Kelima*, rendahnya nilai tukar komodity yang

---

<sup>2</sup>. Adi Sasano, Rakyat Bangkit Bangun Martabat,... P. 77-80

dihasilkan usaha rakyat, *keenam*, keterbatasan akses pada pasar, *ketujuh*, adanya pungutan-pungutan atau biaya siluman yang tidak proporsional.

Sementara itu, pada faktor internal permasalahan yang di hadapi adalah: *Pertama*, keterbatasan penguasaan dan pemilikan asset produksi, terutama permodalan. *Kedua*, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, termasuk rendahnya tingkat keterampilan yang meliputi keterampilan teknik produksi dan manajemen usaha. *Ketiga*, ditinjau dari konsentrasi sumber daya ekonomi rakyat (pekerjaan), pengembangan ekonomi rakyat dihambat oleh konsentrasi ekonomi di daerah perdesaan. Keempat, kelembagaan usaha rakyat belum berperan secara optimal dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi rakyat.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki kelemahan yang sulit berkembang dari pada usaha-usaha besar. Kendala utama usaha mikro informal adalah kemampuan mereka mengakumulasi asset dan mengakses permodalan. Hal ini terjadi karena sektor ini merupakan sektor yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan (unbankable). Kendala aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal menjadi faktor yang mendukung tumbuhnya permintaan terhadap lembaga

keuangan non formal. Para pengusaha mikro informal pada akhirnya harus membayar mahal biaya-biaya dana (rente) yang mereka dapatkan pada pelepas uang.<sup>3</sup>

Muhamad Yunus<sup>4</sup>, dalam biografinya mendeskripsikan pola dan hasil tindakan yang telah dilakukan di grameen bank. Muhamad Yunus membuktikan bahwa dengan metode yang tepat, usaha kecil yang *unbankable* dapat mengakses kredit dengan baik. Beliau bahkan tidak sepakat jika suku bunga yang tinggi harus menetapkan kebijakannya menentukan *pricing* yang kompetitif dengan perbankan komersial.

Di Indonesia juga banyak program penanggulangan dalam memecahkan masalah kemiskinan melalui pengembangan keuangan mikro, seperti: P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Proyek Kredit Mikro (PKM), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (USEDSP), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra) dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>. Efi Syarifudin, "Memperebutkan Pedagang Kecil: Keberadaan BMT dan Renternir pada Komunis Pedagang Kecil di serang Banten" jurnal muamalat(Serang, Fseipress,2011), P. 1

<sup>4</sup>. Muhamad Yunus, Bank Kaum Miskin, (Jakarta: Margin Kiri, 2008), Cetakan ke-4 p. 117

<sup>5</sup>Deyna Hasiholan, *et al* ., Serial Politik untuk Pemula: Politik dan Kemiskinan, ( Depok: Koekoesan, 2007), p. 36

Selanjutnya pemerintah turut memberikan perhatian pada sektor usaha kecil, dengan adanya peraturan menteri nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana BUMN akan mengalokasikan dana sebesar 2% dari keuntungannya bersih setelah pajak untuk program Kemitraan. Keputusan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta berpotensi mengembangkan usaha kecil dan koperasi sehingga menjadi tangguh dan mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat juga mendorong tumbuhnya kemitraan Baitul Mall Wa Tamwil, dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Lembaga keuangan Mikro (LKM) BMT Bina Tijaroh Cilegon merupakan Lembaga Keuangan yang *concerned* dan focus pada upaya pemberdayaan usaha skala mikro/rumah tangga dan kecil. Pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan dan pembiayaan usaha berbasis syariah. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui upaya peningkatan kesadaran spiritual, dan motivasi usaha, peningkatan kemampuan manajemen usaha serta



peningkatan aksesibilitas terhadap akses produksi, produksi pasar dan jaringan.

Selain itu, BMT Bina Tijaroh Cilegon berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pelaku usaha mikro secara masif dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pemanfaatan Dana BMT Bina Tijaroh dan Pendampingan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Cilegon Pelaku Usaha Mikro.*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Kurangnya modal untuk pelaku usaha mikro.
2. Kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan strategi pemasaran.
3. Kurangnya motivasi terhadap pelaku usaha mikro.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahannya tidak meluas, dalam penelitian ini permasalahannya dibatasi pada varabel-variabel berikut:

1. Hanya mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat pendapatan,
2. Hanya mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat konsumsi,
3. Hanya mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat asset.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan dana BMT Bina Tjajah berpengaruh terhadap masyarakat Kota Cilegon Pelaku Usaha Mikro?
2. Apa pengaruh pendampingan dana BMT Bina Tjajah terhadap masyarakat pelaku usaha mikro ?
3. Apakah pemanfaatan dana dan pendampingan BMT Bina Tjajah terhadap Kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon Pelaku Usaha Mikro?

**E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja BMT Bina Tijaroh.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.